

**KARAKTERISTIK LINGKUNGAN, KARAKTERISTIK PETANI
PESANGGEM, DAN PERAN MASYARAKAT LOKAL
DALAM PHBM KPH KENDAL**

TUGAS AKHIR

Oleh:
TRI JATMININGSIH
L2D005407



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009

ABSTRAK

Hutan memiliki peranan penting dalam mempengaruhi keberlanjutan lingkungan. Meskipun hutan termasuk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable natural resources*), tidak berarti keberadaannya tak terbatas. Sumberdaya hutan keberadaannya sangat tergantung dari manajemen, bisa berkurang bila dimanfaatkan oleh manusia secara berlebihan atau lebih besar dari kemampuan alamnya dalam mempermudah diri ataupun dalam upaya manusia memulihkannya (*rehabilitation*).

Sistem PHBM merupakan salah satu aplikasi sistem hutan kemasyarakatan (*social forestry*) yang dimaksudkan untuk mewujudkan interaksi positif antara masyarakat dan hutan melalui pengelolaan partisipatif dan pembinaan produksi hasil hutan non-kayu yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar hutan. Melalui sistem PHBM dalam pengelolaan hutan di KPH Kendal, telah terjadi penurunan gangguan hutan yang signifikan, seperti yang terjadi di Kawasan LMDH Wana Makmur dengan luas hutan 702,40 ha yaitu mulai tahun 2006-2008 pencurian pohon 0 – 90 pohon dan kebakaran terjadi <5%. Pelibatan masyarakat desa hutan dalam setiap tahapan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring, dan evaluasi memberi makna yang dalam bagi mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik lingkungan, karakteristik petani pesanggem, dan peran masyarakat lokal dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di KPH Kendal. Dilihat dari tujuan penelitian, maka penelitian ini disebut penelitian kuantitatif, yakni dilakukan pada sampel yang diambil secara random sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi dimana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2008: 8). Teknik pengumpulan data (bukan metodenya) merupakan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif (Sugiyono, 2008: 27), yang utama menggunakan kuesioner (data yang diperoleh adalah data kuantitatif). Selanjutnya untuk memperkuat dan mengecek validitas data hasil kuesioner tersebut, maka dilengkapi dengan observasi dan wawancara kepada orang yang memahami terhadap permasalahan PHBM di KPH Kendal. Setelah itu, proses pengumpulan data menggunakan triangulasi dalam penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis, karakteristik lingkungan di kawasan KPH Kendal cukup potensial untuk tanaman jati dan pertanian kehutanan. Hutan jati idealnya berada di topografi datar dengan kemiringan lereng <20% sehingga menghasilkan kualitas kayu yang baik dan berharga jual tinggi. Karakteristik tanaman jati bernilai ekonomis tersebut terlihat dari *sharing* yang diterima LMDH Wana Makmur yaitu 25% dari total produksi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Karakteristik lingkungan tersebut didukung oleh karakteristik petani pesanggem di Kawasan KPH Kendal. Karakteristik petani pesanggem yang sudah turun-temurun memanfaatkan hutan merupakan potensi untuk mengembangkan PHBM. Namun, masyarakat lokal yang menjadi petani pesanggem sebagian besar berusia 50 tahun ke atas dan berpendidikan rendah, sehingga menjadi kendala dalam memberikan informasi/teknologi dalam upaya meningkatkan hasil pertanian kehutanan. Hal tersebut mempengaruhi peran masyarakat dalam PHBM. Berdasarkan hasil analisis, masyarakat lokal dalam PHBM sangat berperan pada kegiatan pemeliharaan hutan, perlindungan dan keamanan hutan, serta pembagian *sharing* produksi sedangkan untuk kegiatan penanaman/reboisasi dan rehabilitasi hutan, dan pemungutan hasil hutan masyarakat cukup berperan. Masyarakat kurang berperan dalam kegiatan perencanaan dan monitoring serta evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan. Selain itu, perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan mengenai peningkatan hasil pertanian yang lebih bernilai ekonomis (inovasi hasil pertanian) dan pengembangan sarana pasar untuk menghindari tengkulak yang merugikan masyarakat. Perbedaan peran dalam komunitas petani pesanggem dapat ditindaklanjuti dengan terus meningkatkan pendidikan lingkungan bagi anggota LMDH serta pelatihan untuk meningkatkan skill (keterampilan) masyarakat. Terkait dengan gangguan keamanan hutan, diberikan hukuman/sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan reward/hadiah bagi LMDH yang memenuhi kriteria monitoring dan evaluasi dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan PHBM.

Keywords: peran masyarakat lokal, pengelolaan hutan, pengaruh kondisi lingkungan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumberdaya hutan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Hutan dieksploitasi untuk menyediakan hasil kayu dan non-kayu, memberikan perlindungan terhadap siklus air dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), penyimpanan karbon, serta pemeliharaan keanekaragaman hayati dan habitat (Suhendang, 2002). Bahkan saat ini, hutan banyak berfungsi sebagai tujuan rekreasi, khususnya oleh masyarakat perkotaan yang jenuh akan rutinitas aktivitas di kota (Setyono, 2007).

WCFS (2000: 6) dalam Setyono (2007), mengindikasikan eksploitasi dan kerusakan hutan mengakibatkan lebih dari 15 juta ha hutan hilang pertahun. Data lain menyebutkan lebih dari 14 juta ha hutan tropis sudah hilang sejak 1980 dan berubah menjadi lahan pertanian dan lahan budidaya. Sebagai konsekuensinya, banyak spesies yang punah akibat kerusakan hutan (Setyono, 2007).

Kebijakan pembangunan kehutanan yang selama ini bersifat sentralistik dianggap oleh beberapa pihak tidak efektif menjaga kawasan hutan. Dengan sistem ini, masyarakat lokal kurang dilibatkan dalam pengelolaan hutan yang sesungguhnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka dan kadangkala mereka justru dirugikan akibat kebijakan yang telah diambil pemerintah secara sepihak. Keterbatasan yang dimiliki pemerintah seperti kurangnya tenaga lapangan, sarana dan prasarana, serta dana, telah menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan mengelola sendiri hutan yang sangat luas tersebut (Rahardjo dan Isnaini, 2006 dalam Waznah, 2009). Diharapkan dengan meletakkan masyarakat sebagai kunci utama pembangunan, mereka akan secara aktif mengelola dan mengembangkan potensi lokal secara optimal, sehingga dapat mencapai tujuan pengembangan lokal (Friedman, 1992 dalam Sawitri, 2006).

Berdasarkan beberapa pengalaman penerapan partisipasi masyarakat di beberapa negara, pengelolaan hutan akan lebih baik dan efektif bila melibatkan masyarakat secara sungguh-sungguh, seperti yang dikemukakan oleh Waznah (2009). Hal ini didukung Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999: 'Pemerintah Daerah Memiliki Kewenangan untuk Mengelola Wilayahnya,' maka perlu mengembangkan Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

PHBM adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara pemerintah (Perum Perhutani) dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal (Perum Perhutani, 2008 dan Gardu Tani, 2008). Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan. Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, pengembangan hutan di Jawa dilakukan dengan Sistem PHBM.

Sumberdaya hutan merupakan potensi lokal yang tidak dimiliki oleh semua wilayah (Tarigan, 2005). Indonesia merupakan negara penghasil hutan terbesar di Asia Tenggara dan nomor dua terbesar setelah Brasil (Sardjono, 2004). Menurut Sumadhijo (1998), sebagian besar daerah tertinggal berada di daerah sekitar atau di dalam hutan dimana mata pencaharian utama masyarakatnya sangat bergantung pada sumberdaya hutan tersebut. Adapun hutan jati yang hingga sekarang masih menjadi komoditas mewah karena banyak diminati masyarakat walaupun harga jualnya mahal (Siregar, 2005), sebagian besar terdapat di Pulau Jawa dan pengelolaannya dilakukan oleh Perum Perhutani (Asosiasi Meubel Indonesia, 2001).

Luasnya hutan jati yang dikelola Perum Perhutani membuat kesulitan dalam penjagaan hutan, sehingga gangguan keamanan hutan sangat rawan terjadi. Suharto, Humas KPH Kendal mengungkapkan, "Pada era reformasi (1998-2002) Perum Perhutani seolah-olah dibuat tak berdaya menghalau penjarahan kayu secara membabi buta, tak sedikit korban jiwa, harta benda milik petugas hancur, dan bahkan aset negara dijarah." Oleh sebab itu dalam pengelolaan hutan penting melibatkan masyarakat lokal (desa hutan) bukan hanya sebagai obyek yang terkena dampak namun juga subjek dalam pembangunan yaitu melalui sistem PHBM.

Sistem PHBM yang dilaksanakan Perum Perhutani mulai 2002 dalam pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) di Jawa menunjukkan adanya peningkatan hasil keuntungan setiap tahunnya (Perum Perhutani, 2009). Adanya sistem PHBM dengan melibatkan masyarakat desa hutan memberikan peluang lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang secara tidak langsung turut berpartisipasi menjaga hutan. Dengan terjaganya hutan maka akan meningkatkan hasil produksi hutan seperti KPH Kedu Selatan selama 2008 meningkat hingga 19% dibanding 2007 (Radar Semarang, 2009). Selain itu, PHBM juga memberikan pengaruh menurunnya gangguan keamanan hutan, seperti KPH Saradan di Jawa timur tahun 2008 terjadi kebakaran hutan seluas 5.510,65 ha namun di tahun 2009 menurun menjadi 90,19 ha (Bappeprop Jatim, 2009). Hal ini memperlihatkan bahwa mengikutsertakan masyarakat pada pelatihan pemadaman kebakaran hutan dalam program PHBM meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berperan menjaga keamanan hutan.



Sumber: Bappeprop Jatim, 2009

Gambar 1.1
Pelatihan Penanganan Kebakaran Hutan KPH Saradan 13 Agustus 2009

Tampak dalam Gambar 1.1, pelatihan pemadaman kebakaran hutan jati diikuti oleh petugas dibantu masyarakat desa hutan. Kebakaran hutan yang selalu terjadi setiap tahun di Jawa Timur menurut Gubernur Jatim, Dr. Soekarwo, dapat terjadi karena faktor manusia baik sengaja maupun tidak disengaja, rendahnya partisipasi masyarakat, lokasi sulit dijangkau, ataupun rendahnya sarana dan prasarana (Bappeprop Jatim, 2009).

Salah satu hutan bersertifikat internasional yang telah melaksanakan PHBM yaitu Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal. Dengan dilaksanakannya sistem tersebut, KPH Kendal mengalami peningkatan hasil hutan non-kayu pada tahun 2003-2007. Selama kurun waktu itu, menurut data Perum Perhutani, gangguan keamanan hutan meliputi pencurian, perusakan, penggembalaan, dan kebakaran hutan menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi keamanan hutan pada tahun 2007 relatif kondusif, hal ini ditunjukkan dengan lebih rendahnya tingkat gangguan keamanan hutan sampai dengan Desember 2007 apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2006 di bulan yang sama, yaitu lebih rendah 54% dari tahun 2006 (Perum Perhutani, 2009).

1.2 Perumusan Masalah

Luas hutan KPH Kendal yakni 20.416,77 ha, pembagiannya meliputi luas hutan produksi yaitu 83%, hutan lindung 13%, dan areal tidak efektif untuk produksi sebesar 3% (Suara Merdeka, 2006). Dalam usaha meningkatkan peran masyarakat lokal dalam PHBM, maka KPH Kendal pengelolaannya bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Hingga 2008 telah terbentuk 81 LMDH, salah satunya yaitu LMDH Wana Makmur dengan luas petak pangkuan hutan 702,40 ha.